

# **Pemupukan Dana Melalui Perbankan: Kasus Sumatera Barat**

Rustian KAMALUDDIN\*

## **PENDAHULUAN**

Dalam GBHN dikemukakan antara lain bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa.

Di samping itu juga dikemukakan bahwa penerahan dana-dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal, perlu makin ditingkatkan dalam bentuk deposito, penerbitan surat berharga dan jenis tabungan lainnya, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.

Jika diperhatikan perkembangan sumber pembiayaan pembangunan secara nasional ternyata bahwa sejak awal Pelita I hingga tahun pertama Pelita IV secara absolut jumlah tabungan pemerintah selalu meningkat yaitu dari Rp 27 milyar pada tahun 1969/70 hingga menjadi Rp 6.477 milyar pada tahun 1984/85. Demikian pula secara persentase telah ada kecenderungan peningkatan sumber pembiayaan dari tabungan pemerintah dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari bantuan luar negeri. Ternyata selama periode itu telah terjadi kecenderungan penurunan peranan sumber pembiayaan yang berasal dari bantuan luar negeri, sungguhpun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1969/70 peranan bantuan luar negeri itu sebesar 77%, maka

---

\*Guru Besar Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

pada tahun-tahun berikutnya umumnya cenderung menurun sehingga menjadi 35% pada tahun 1984/85. Namun demikian pada dua tahun anggaran akhir-akhir ini peranan bantuan atau pinjaman luar negeri itu semakin meningkat kembali, sehingga mencapai 41% pada tahun 1985/86 dan 43% pada tahun 1986/87, yang bahkan diperkirakan mungkin akan lebih tinggi lagi karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan peningkatan tabungannya akibat harga minyak bumi yang turun dengan tajam akhir-akhir ini.

Sehubungan dengan itu, agar sumber pembiayaan pembangunan itu tetap berada dalam jalur penggarisan GBHN di mana sumber dana dari bantuan luar negeri tetap sebagai pelengkap, maka pemupukan atau akumulasi dana dari dalam negeri, termasuk di daerah-daerah, perlu semakin digalakkan dan ditingkatkan di masa mendatang. Dengan demikian, kita mengharapkan agar ketergantungan dana pembiayaan pembangunan nasional dari sumber luar negeri itu jangan sampai semakin besar atau semakin berperanan besar, sehingga di kemudian hari akan menyulitkan negara akibat beban cicilan hutang beserta bunganya yang semakin memberati.

Tulisan ini terutama menitikberatkan tinjauannya pada pemupukan dana melalui perbankan kasus daerah di Sumatera Barat, khususnya melalui Giro, Deposito, Tabanas dan Taska. Dengan dapat dihimpun dan dipupuknya dana melalui perbankan yang semakin besar berarti akan dapat meningkatkan kemampuan bank-bank tersebut untuk memberikan pinjamannya kepada swasta dan masyarakat. Ini berarti akan dapat meningkatkan lebih lanjut pembangunan sektor swasta dan masyarakat yang dana pembiayaannya bersumber dari lembaga perbankan, khususnya untuk pembangunan di daerah ini.

## PEMUPUKAN DANA SECARA TOTALITAS

Kebijaksanaan pengerahan dana yang dilaksanakan pemerintah pada beberapa tahun yang lalu hingga sekarang masih tetap menitik-beratkan pada usaha peningkatan tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah terus berusaha meningkatkan gairah menabung antara lain dengan menangguk pelaksanaan pungutan pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Di samping itu diambil pula kebijaksanaan yang menetapkan bahwa bank umum dan bank pembangunan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat menerbitkan sertifikat deposito atas unjuk. Dapat ditambahkan dalam hal ini bahwa sebelum Oktober 1984, penerbitan sertifikat deposito hanya dilaksanakan oleh bank pemerintah dan sebagian besar bank asing.

Sebagai hasil dari kebijaksanaan dan tindakan pemerintah serta usaha perbankan di bidang pemupukan dana ini, dapat dilihat jumlah dana secara kumulatif yang terhimpun melalui lembaga perbankan dalam Tabel 1 yang berikut.

Tabel 1

**PEMUPUKAN DANA MELALUI PERBANKAN DI SUMATERA BARAT**  
(dalam juta rupiah)

| Akhir Tahun/Bulan | Giro   | Deposito | Tabungan | Jumlah  |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|
| 1977              | 11.414 | 3.954    | 2.370    | 17.738  |
| 1978              | 14.781 | 3.671    | 3.210    | 21.662  |
| 1979              | 17.642 | 3.554    | 2.978    | 24.174  |
| 1980              | 27.471 | 4.324    | 3.847    | 35.662  |
| 1981              | 34.760 | 7.623    | 5.796    | 48.179  |
| 1982              | 43.115 | 10.761   | 8.005    | 61.881  |
| 1983              | 43.111 | 18.422   | 10.360   | 71.893  |
| Juni 1983         | 41.967 | 13.890   | 9.624    | 65.481  |
| 1984              | 53.112 | 32.308   | 14.080   | 98.500  |
| 1985              | 72.667 | 59.552   | 21.252   | 153.471 |

*Catatan:* Dalam giro di atas tidak termasuk yang pada Bank Indonesia, dalam deposito ini termasuk sertifikat deposito dan dalam tabungan tersebut termasuk Tabanas dan Taska serta tabungan lainnya, tetapi tidak termasuk Tabanas dari Kantor Pos dan Giro.

Jika dikaji lebih lanjut mengenai perkembangan pemupukan dana perbankan secara keseluruhannya dalam periode dari tahun 1977 hingga 1985 telah terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 31,0% per tahun. Peningkatan yang terbesar adalah pada deposito dengan laju pertumbuhan 40,4% per tahun kemudian menyusul berturut-turut tabungan 31,5% dan giro 26,0% per tahun.

Dilihat dari segi peranannya, maka ternyata bahwa pemupukan dana melalui giro adalah yang terbesar yaitu rata-rata sebesar 65,0% dari jumlah pemupukan dana seluruhnya. Kemudian disusul oleh deposito 21,8% dan tabungan 13,2%. Namun demikian telah terjadi sedikit pergeseran peranan dari ketiga jenis objek pemupukan dana tersebut, yaitu peranan giro relatif agak menurun yaitu dari 63,3% pada tahun 1977 menjadi 47,3% pada tahun 1985. Sebaliknya peranan deposito cenderung meningkat yaitu dari 22,3% pada tahun 1977 menjadi 38,8% pada tahun 1985. Sedangkan peranan tabungan rata-rata hampir sama saja, yaitu tetap sekitar 13,2% dari jumlah pemupukan dana keseluruhannya.

Khusus ditinjau mengenai perkembangan pemupukan dana sejak dilakukannya liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 di mana antara lain suku bunga berjangka pada prinsipnya ditetapkan sendiri oleh bank penyelenggara, maka ternyata terdapat perkembangan pemupukan dana yang semakin meningkat. Dibandingkan dengan Juni 1983, jumlah pemupukan dana keseluruhannya pada akhir tahun 1985 telah meningkat 134%. Peningkatan yang sangat menonjol terjadi pada deposito yaitu meningkat menjadi lebih dari 4 kali lipat. Kemudian juga terdapat peningkatan yang cukup besar pada pemupukan dana lainnya, yaitu tabungan meningkat 120% dan giro meningkat 73% dibandingkan dengan Juni 1983. Ini berarti bahwa sejak dilakukannya liberalisasi perbankan itu telah terjadi peningkatan yang sangat menonjol pada jumlah deposito, hal mana pada dasarnya terjadi terutama akibat tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dari pada sebelumnya dan adanya kestabilan moneter yang cukup baik.

#### DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Sebelum 1 Juni 1983 yaitu sebelum berlakunya liberalisasi perbankan, suku bunga deposito berjangka pada bank-bank pemerintah ditentukan oleh Bank Indonesia, sedangkan suku bunga pada bank-bank lainnya pada dasarnya ditetapkan oleh masing-masing bank penyelenggara yang bersangkutan. Adapun suku bunga pada deposito berjangka pada bank-bank pemerintah tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan sejak tahun 1977 telah dua kali mengalami perubahan yaitu yang berlaku mulai 13 Januari 1977 dan yang berlaku mulai 1 Januari 1978, yang mana suku bunganya relatif agak mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Deposito berjangka pada lembaga perbankan di Sumatera Barat terdiri atas deposito-deposito berjangka 24 bulan, 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan kurang dari 3 bulan, sedangkan deposito berjangka 18 bulan dapat diabaikan atau hampir tidak ada sama sekali. Mengenai perkembangan jumlah deposito berjangka pada bank-bank pemerintah yang merupakan bagian besar dari deposito berjangka pada lembaga-lembaga perbankan di daerah ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Dari perkembangan deposito berjangka pada bank-bank pemerintah tersebut di atas jika dikaji lebih lanjut ternyata bahwa dalam periode 1977-1985 yang memegang peranan terbesar adalah deposito 24 bulan yaitu rata-rata sebesar 50,6% dari jumlah deposito keseluruhannya. Kemudian menyusul berturut-turut deposito 12 bulan sebesar 21,2%, deposito 6 bulan sebesar 14,4%, deposito 3 bulan sebesar 8,0% dan yang terkecil peranannya adalah deposito kurang dari 3 bulan yaitu hanya sebesar 4,8%. Namun demikian jika

Tabel 2

DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI SUMATERA BARAT  
(dalam juta rupiah)

| Akhir Tahun/<br>Bulan | Jumlah Deposito |       |       |       |       | Jumlah |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                       | 24 bl           | 12 bl | 6 bl  | 3 bl  | <3 bl |        |
| 1977                  | 1.771           | 255   | 342   | 35    | —     | 2.403  |
| 1978                  | 1.220           | 309   | 51    | 28    | —     | 1.608  |
| 1979                  | 1.236           | 226   | 31    | 0     | —     | 1.493  |
| 1980                  | 1.063           | 196   | 40    | 10    | —     | 1.309  |
| 1981                  | 840             | 279   | 262   | 28    | 38    | 1.447  |
| 1982                  | 1.008           | 203   | 169   | 85    | —     | 1.464  |
| 1983                  | 513             | 1.223 | 1.220 | 633   | 756   | 4.346  |
| Juni 1983             | 859             | 303   | 301   | 251   | 338   | 2.052  |
| 1984                  | 194             | 3.703 | 2.642 | 3.117 | 1.403 | 11.059 |
| 1985                  | 242             | 7.403 | 4.286 | 2.935 | 1.748 | 16.614 |

khusus ditinjau perkembangan dalam periode 1983-1985 ternyata bahwa yang berperan paling besar adalah deposito 12 bulan yaitu sebesar 35,4%. Kemudian disusul berturut-turut oleh deposito 6 bulan sebesar 25,9%, deposito 3 bulan sebesar 20,2%, deposito kurang dari 3 bulan sebesar 13,5% dan yang terkecil peranannya adalah deposito 24 bulan yaitu hanya 5,0% dari jumlah deposito seluruhnya.

Adanya perubahan dan pergeseran dalam peranan dari masing-masing jenis deposito berjangka itu adalah karena terjadinya perkembangan yang berbeda di antara masing-masing. Dalam periode dari tahun 1977 hingga 1985 jumlah deposito berjangka keseluruhannya telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 27,3% per tahun. Namun demikian perkembangannya agak berbeda satu sama lainnya, di mana deposito 24 bulan cenderung menurun, lebih-lebih sejak tahun 1983, sedangkan deposito kurang dari 3 bulan yang sebelum tahun 1983 hampir tidak ada, ternyata sejak tahun 1983 telah menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup pesat. Deposito berjangka 12 bulan, 6 bulan dan 3 bulan, masing-masingnya jelas menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam periode 1977-1985, lebih-lebih sejak tahun 1983.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa jika dibandingkan posisi akhir tahun 1985 dengan posisi Juni 1983 saat mulai berlakunya liberalisasi perbankan, ternyata jumlah deposito berjangka keseluruhannya telah meningkat menjadi lebih 8 kali lipat. Namun demikian deposito 24 bulan yang memegang peranan terbesar sebelumnya telah menurun sebesar 72% selama dua setengah tahun tersebut. Ini berarti masyarakat, khususnya pemegang deposito, pada

akhir-akhir ini kurang begitu bergairah menyetor uangnya untuk jangka waktu lama tersebut. Selama periode Juni 1983 - Desember 1985 tersebut yang terbesar peningkatannya adalah deposito 12 bulan yaitu meningkat menjadi lebih 24 kali lipat, kemudian menyusul berturut-turut deposito 6 bulan menjadi lebih 14 kali lipat, deposito 3 bulan menjadi lebih 11 kali lipat dan deposito kurang dari 3 bulan meningkat menjadi lebih 5 kali lipat. Sebaliknya deposito 24 bulan telah turun sebesar 72% dalam jangka waktu 2½ tahun tersebut. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan liberalisasi perbankan disertai dengan penangguhan-penangguhan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, telah dapat meningkatkan gairah menabung dengan pesat sekali.

Selanjutnya pengerahan dana melalui lembaga perbankan itu adalah berupa sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank-bank penyelenggara. Jumlah sertifikat deposito yang telah diterbitkan dalam menghimpun dana tersebut khususnya pada lima tahun terakhir ini juga telah cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 1977-1980 penghimpunan dana dengan cara tersebut dapat dikatakan sangat kecil atau hampir tidak ada sama sekali. Jumlah sertifikat deposito yang diterbitkan dan terhimpun di Sumatera Barat pada tahun 1981 cukup tinggi yaitu sebesar Rp 351 juta, kemudian menurun dengan tajam menjadi Rp 66 juta pada tahun 1982, dan tahun-tahun berikutnya cenderung meningkat yaitu menjadi Rp 292 juta (1983), Rp 403 juta (1984) dan Rp 2.426 juta (1985). Mengenai peranan dan distribusi sertifikat deposito ini menurut jangka waktunya pada periode 1981-1985 yang terbesar secara rata-rata adalah sertifikat deposito 12 bulan yaitu 39,1% dari jumlah keseluruhannya. Kemudian menyusul berturut-turut sertifikat deposito 6 bulan sebesar 34,0%, sertifikat deposito <3 bulan sebesar 13,9% dan sertifikat deposito 3 bulan sebesar 13,0 dari jumlah keseluruhannya.

Dibandingkan dengan posisi Juni 1983, maka ternyata bahwa jumlah dana sertifikat deposito 12 bulan di daerah ini pada Desember 1985 telah meningkat menjadi 27 kali lipat. Kemudian menyusul sertifikat deposito 6 bulan yang telah meningkat menjadi lebih 12 kali lipat, dan sertifikat deposito 3 bulan meningkat menjadi 5 kali lipat. Sedangkan jumlah dana sertifikat deposito < 3 bulan pada Desember 1985 hanya meningkat sebesar 54% dibandingkan dengan posisi Juni 1983. Seperti halnya pada deposito berjangka, maka perkembangan ini berarti bahwa sertifikat deposito yang dikeluarkan lembaga perbankan ini telah cukup menarik minat dan merangsang masyarakat, khususnya pihak swasta, dalam menghimpun dana bagi keperluan pembangunan, khususnya untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah ini.

## TABANAS DAN TASKA

Di samping melalui deposito yang dikemukakan di atas, penerahan dana masyarakat diusahakan pula melalui Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) yang mulai dilaksanakan sejak 20 Agustus 1971. Suku bunga Tabanas dan Taska ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang semula suku bunga Tabanas adalah 18% per tahun dan Taska 15% per tahun. Tahun-tahun kemudian ketentuan-ketentuannya hanya sedikit saja mengalami perubahan, di mana ada variasi dalam penetapan suku bunganya dengan memperhatikan besarnya saldo tabungan yang tersedia.

Mulai 13 Januari 1977 suku bunga Tabanas ditetapkan 15% per tahun untuk saldo tabungan Rp 200 ribu yang pertama, sedangkan untuk saldo di atas jumlah itu adalah 6% per tahun. Suku bunga Taska juga diturunkan menjadi 9% per tahun. Perubahan berikutnya terjadi mulai 1 Juni 1983 yang berlaku hingga sekarang, yaitu di mana suku bunga Tabanas ditetapkan sebesar 15% per tahun untuk saldo tabungan Rp 1 juta yang pertama, sedangkan untuk saldo jumlah di atas itu adalah 12% per tahun. Suku bunga Taska tetap 9% per tahun, namun bila ditarik sebelum jatuh waktu, suku bunganya hanya 6% per tahun.

Tabanas dapat diklasifikasikan atas Tabanas pelajar, Tabanas pramuka, Tabanas pegawai dan Tabanas umum, sedangkan Taska hanya berupa Taska umum saja. Jika diperhatikan perkembangan posisi Tabanas dan Taska yang terhimpun di Sumatera Barat sejak tahun 1977 hingga tahun 1985 ternyata bahwa secara totalitas jumlah keseluruhannya cenderung meningkat terus, lebih-lebih sejak Juni 1983 telah cukup tinggi penanjakannya. Namun demikian, posisi Taska dan masing-masing jenis Tabanas itu menunjukkan perkembangan yang agak berbeda satu sama lainnya. Untuk jelasnya hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Sungguhpun jumlah pelajar dan pramuka yang menabung melalui Tabanas cukup pesat peningkatannya, akan tetapi karena jumlah tabungannya masing-masing adalah kecil, maka peranan uang tabungan Tabanas pelajar dan pramuka itu relatif sangat kecil. Demikian pula mengenai Taska, baik jumlah penabung maupun jumlah uang tabungan melalui cara ini, agak berfluktuasi tetapi dana yang terhimpun sangat kecil jumlahnya sehingga peranannya hampir tidak ada atau dapat diabaikan sama sekali. Peranan yang terbesar dalam Tabanas dari tahun 1977-1985 tetap Tabanas umum yaitu rata-rata sebesar 92,5% dari jumlah seluruh tabungan ini tiap tahun. Namun peranannya itu agak mengalami sedikit pergeseran yaitu dari 95,1% pada tahun 1977 menurun menjadi 90,3% pada tahun 1985. Peranan Tabungan Pegawai yang rata-rata 6,5% tiap tahun agak cenderung mengalami kenaikan, yaitu

Tabel 3

POSISI TABANAS DAN TASKA DI SUMATERA BARAT  
(dalam juta rupiah)

| Akhir Tahun<br>Bulan | Tabanas<br>Pelajar +<br>Pramuka | Tabanas<br>Pegawai | Tabanas<br>Umum | Taska | Jumlah   |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------|
| 1977                 | 1,3                             | 115,9              | 2.304,9         | 0,8   | 2.422,9  |
| 1978                 | 20,9                            | 183,9              | 3.114,1         | 1,0   | 3.319,9  |
| 1979                 | 12,9                            | 210,0              | 2.902,0         | 0,5   | 3.125,2  |
| 1980                 | 28,0                            | 265,6              | 3.869,2         | 0,2   | 4.163,0  |
| 1981                 | 36,4                            | 354,7              | 5.658,9         | 0,1   | 6.050,1  |
| 1982                 | 44,9                            | 506,6              | 6.798,7         | 2,4   | 7.352,6  |
| 1983                 | 165,5                           | 615,3              | 8.800,5         | 3,7   | 9.584,8  |
| Juni 1983            | 59,1                            | 485,0              | 7.151,2         | 0,2   | 7.695,5  |
| 1984                 | 308,9                           | 1.095,7            | 11.611,2        | 0,4   | 13.016,2 |
| 1985                 | 359,4                           | 1.491,7            | 17.185,2        | —     | 19.036,3 |

*Catatan:* Dalam Tabanas di sini termasuk Tabanas dari Kantor dan Giro Tetapi tidak termasuk Tabungan lainnya.

dari 4,8% pada tahun 1977 naik menjadi 7,8% pada tahun 1985. Demikian pula peranan uang Tabanas pegawai negeri dan pramuka yang hanya sebesar rata-rata 1,0% tiap tahun cenderung mengalami kenaikan yaitu dari hampir tidak ada pada tahun 1977 menjadi 1,9% dari jumlah seluruh jenis tabungan ini.

Perubahan-perubahan peranan dari jenis-jenis Tabanas dan Taska tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan laju pertumbuhannya masing-masing. Dalam periode 1977-1985 secara totalitas jumlah uang Tabanas dan Taska itu telah meningkat dengan laju pertumbuhan 29,4% per tahun. Khusus Tabanas umum telah meningkat dengan laju pertumbuhan 28,5% per tahun, Tabanas pegawai 37,6% per tahun, serta Tabanas pelajar dan pramuka sejak tahun 1978 rata-rata meningkat 50,1% per tahun. Namun demikian jika ditinjau perkembangan sejak Juni 1983 hingga Desember 1985 ternyata bahwa jumlah uang Tabanas dan Taska itu secara keseluruhan telah meningkat menjadi hampir 2,5 kali lipat, Tabanas umum meningkat 2,4 kali lipat, Tabanas pelajar dan pramuka meningkat menjadi hampir 6,5 kali lipat. Sebaliknya pengumpulan dana melalui Taska cenderung mengalami kemerosotan, sehingga pada akhir Desember 1985 Taska boleh dikatakan tidak ada lagi.

Khusus mengenai Tabanas dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan liberalisasi perbankan Juni 1983 serta adanya kestabilan moneter yang cukup



mantap, sungguhpun suku bunga tabungannya tidak mengalami perubahan yang berarti, masih tetap cukup merangsang kearah peningkatan tabungan melalui Tabanas. Sebaliknya tabungan dalam bentuk Taska tidaklah menarik masyarakat sama sekali untuk menabung, mungkin antara lain karena suku bunganya yang sangat rendah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari uraian dan perkembangan pemupukan dana melalui perbankan sebagaimana yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa usaha pemerintah dan perbankan, khususnya di daerah Sumatera Barat, memberikan gambaran yang cukup mengesankan, terutama sejak berlakunya kebijaksanaan liberalisasi perbankan Juni 1983. Dana yang terhimpun yang dapat disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan serta kegiatan dan usaha di bidang perekonomian/pembangunan, telah dapat semakin ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masih banyak dana masyarakat yang dapat dihimpun asal saja kepada para penabung diberikan perangsang dan fasilitas yang memadai untuk memobilisasi tabungan tersebut.

Sungguhpun mungkin terjadi sedikit pergeseran antar bank-bank, baik antara bank pemerintah dengan bank swasta, maupun antara bank satu sama lainnya, dalam peranannya untuk menghimpun dana melalui giro, deposito dan tabungan lainnya, namun secara keseluruhan maupun pada masing-masing bank jumlah pemupukan dana telah meningkat dengan cukup memuaskan. Struktur deposito berjangka agak mengalami sedikit pergeseran, yaitu agak bergeser dari tabungan yang berjangka panjang ke arah yang berjangka relatif lebih pendek, khususnya dari deposito 24 bulan kepada deposito 3-12 bulan. Sedangkan jenis tabungan berupa Tabanas ternyata menunjukkan bahwa Tabanas umum tetap mendominasi dan sangat menonjol. Namun demikian peranannya itu agak sedikit bergeser (sungguhpun relatif kecil saja) ke arah Tabanas pegawai dan Tabanas pelajar. Sebaliknya dana Taska yang terhimpun sangat kecil sekali, bahkan semakin merosot, sehingga dapat diabaikan sama sekali. Sehubungan dengan perkembangan itu maka pengaturan dan penyempurnaan dalam sistem deposito berjangka dan Tabanas tetap perlu mendapat perhatian, sehingga diharapkan dana yang terhimpun dari padanya tetap meningkat di masa-masa mendatang. Sedangkan sistem Taska perlu ditinjau kembali, yaitu apakah perlu ditingkatkan daya tarik dan perangsangnya, atau kalau perlu dihapuskan sama sekali karena tidak menarik dan tidak efisien lagi.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa usaha perbankan itu mempunyai dua sisi, yaitu pada sisi pertama menghimpun dana sebanyak dan seefisien

mungkin dari masyarakat berupa giro, deposito dan simpanan lainnya. Dan pada sisi lainnya menyalurkan dana tersebut kepada para nasabah berupa kredit perbankan untuk berbagai usaha dan kegiatannya. Dalam hubungan ini bank berfungsi pula sebagai suatu badan usaha yang berusaha memperoleh keuntungan dari kegiatan "memperjualbelikan" uang tersebut, sehingga dia akan dapat hidup dan berusaha secara wajar.

Dalam mengusahakan keuntungan bank tersebut, maka prinsip dasar dalam pembentukan keuntungannya adalah terciptanya "marjin bunga," yaitu selisih antara bunga yang diterima bank dari perkreditan yang diberikannya dengan bunga yang harus dibayarkannya kepada simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Di sinilah timbulnya dilemma, yaitu pada satu pihak untuk menghimpun dana yang semakin besar dari masyarakat, maka suku bunga deposito perlu ditetapkan lebih tinggi. Akan tetapi untuk memperoleh marjin bunga yang wajar, maka suku bunga kredit yang dibebankan pada nasabah harus lebih tinggi pula. Hal ini tentulah tidak menarik dan tidak merangsang bagi para nasabah untuk menggunakan kredit dalam proyek atau usaha kegiatannya.

Sebaliknya pada lain pihak, untuk dapat merangsang terciptanya dan berkembangnya kegiatan ekonomi dan pembangunan, khususnya usaha swasta dan masyarakat, maka suku bunga kredit perbankan perlu ditekan serendah mungkin. Dengan suatu tingkat marjin bunga yang wajar, tentulah pihak perbankan hanya mampu menghimpun dana dari masyarakat dengan suku bunga yang relatif lebih rendah. Hal ini jelas tidak akan dapat mendorong atau merangsang masyarakat untuk menabung. Ini berarti bank yang bersangkutan tidak/kurang akan berhasil dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk keperluan pembangunan, terutama dalam keadaan keuangan negara yang serba sulit seperti dewasa ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, walaupun bank-bank sejak berjalannya liberalisasi perbankan mulai 1 Juni 1983 bebas bersaing dan bebas menetapkan suku bunga deposito dalam menghimpun dana, akan tetapi penerapannya perlu dilakukan dengan hati-hati, yaitu yang memberikan tingkat marjin bunga, suku bunga simpanan, dan suku bunga perkreditan yang cukup wajar dan saling menguntungkan bagi ketiga pihak yang bersangkutan. Untuk ini antara lain antar perbankan sendiri perlu pula adanya kerjasama dalam menetapkan batas-batas terendah dan tertinggi atas suku bunga simpanan dan perkreditan dalam batas kewajarannya.

Di samping hal tersebut di atas, dalam menarik dan merangsang simpanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan kelancaran sistem dan birokrasi, penempatan "kelembagaan" bank secara lebih dekat kepada masyarakat yang

potensial untuk menabung, serta berbagai kemudahan/perangsang lainnya yang mungkin dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya dana yang terhimpun itu jangan sampai "nganggur" sehingga terjadi kelebihan likuiditas, baik untuk sementara maupun dalam jangka waktu yang agak lama. Dalam hubungan ini perlu peningkatan kreativitas, motivasi dan "mobilitas" para petugas perbankan dalam memperoleh proyeksi nasabahnya yang "feasible" untuk diberikan bantuan perkreditan. Dan sejalan dengan itu perlu diberikan kemudahan birokrasi dan fasilitas lainnya secara lebih baik dalam batas-batas yang wajar dan bijaksana.

#### SUMBER DATA DAN INFORMASI

Bank Indonesia (Pusat), *Laporan Tahunan 1984/1985*

Bank Indonesia (Pusat), *Laporan Mingguan*, no. 1403, 27 Maret 1986.

Republik Indonesia, *Bahan-bahan Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1986/1987*.

Bank Indonesia Padang, *Data Statistik Perbankan Sumatera Barat*, Triwulan IV/1983 dan Triwulan IV/1985.